

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Riska Rahmawati

Nomor Mahasiswa : 144214852

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Local Taxes, Local Retributions, General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Fund (DAK) to the allocation of Capital Expenditures in D.I Yogyakarta, consisting of five districts / cities period 2012-2015.

This research is to analyze variable X to varabel Y. The research design is based on APBD data in Realization of Regional Revenue and Expenditure DI Yogyakarta year 2012-2016 taken from BPS DI Yogyakarta with sample of data of Local Tax, Levy Area, DAU, DAK and Shopping Capital. The variables used are Local Tax (X1), Local Retribution (X2), General Allocation Fund (X3), Special Allocation Fund (X4), and Capital Expenditure (Y). Analysis for testing in this study used SPSS.20, used are Multiple Regression Analysis, Test t, Test F, and Determination Coefficient Test.

The results of this study indicate that partially Levy Area and Special Allocation Fund (DAK) have no significant effect on Capital Expenditure, while Local Taxes and Special Allocation Fund (DAK) have influence on Capital Expenditure simultaneously Regional Taxes, Local Levies, DAU , and DAK has a significant influence on Capital Expenditure. The magnitude of the effect of Regional Tax, Regional Retribution, DAU, and DAK on Capital Expenditure is 77.8% while the remaining 22.2% is explained by other factors.

Keywords: Local Tax, Regional Retribution, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH, DANAALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL di D.I YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Keberhasilan menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat yang tiada henti
2. Bapak Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua STIE Widya Wiwaha
3. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini, SE, Msi selaku ketua Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha
4. Bapak Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak selaku dosen pembimbing terimakasih atas kesabaran dan semua bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Semua Dosen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan bekal ilmu selama di bangku perkuliahan sehingga dapat tersusun skripsi ini

6. Orangtua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam hal apapun, Ibu saya yang selalu memberikan nasehat mendengarkan keluhan dan menguatkan dalam keadaan apapun
7. Mas Naafi' Nur Pratama yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan selalu memberikan semangat
8. Ibu Guru Zartinah yang bersedia meminjamkan leptopnya selama hampir 6 bulan untuk progress pengerjaan skripsi ini
9. Keluarga Minus ku teman terbaik yang selalu menemani dari awal di bangku perkuliahan sampai semester akhir, Kaka Rika, Mami Novi, Mba Widuri, Noke Francisca yang selalu saling memberikan semangat, saling membantu dan mendukung satu sama lain
10. Mba Ella, Mba Chusnul, Mba Darti partner kerja saya yang selalu menyemangati saya untuk terus menyelesaikan skripsi ini
11. Teman satu bimbingan Mas Ali, Mba Fitriana, Mba Sevita, Mba Rika, Mba Nia yang selalu berbagi informasi selama progress penyusunan skripsi ini
12. Serta kepada semua pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebut satu persatu saya sampaikan terimakasih atas segala bantuan yang diberikan

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 2018

Riska Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	5
C Batasan Masalah.....	5
D Tujuan Penelitian.....	6
E Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
A Deskripsi Teori	8
1 Keuangan Daerah	8

2	Belanja Modal	9
3	Pajak Daerah.....	12
4	Retribusi Daerah.....	13
5	Dana Alokasi Umum	15
6	Dana Alokasi Khusus	17
B	Penelitian Terdahulu.....	17
C	Kerangka Berpikir	23
D	Hipotesis Penelitian.....	25
BAB III		30
METODE PENELITIAN.....		30
A	Subjek dan Objek Penelitian	30
B	Jenis Penelitian.....	30
C	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	30
D	Definisi Variabel dan Pengukuran	31
E	Teknik Analisis Data	33
1	Pengujian Asumsi Klasik	33
2	Metode Regresi Linier Berganda.....	36
3	Uji Hipotesis.....	37
BAB IV		40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A	Hasil Penelitian.....	40
1	Data Umum	40

2	Data Khusus	43
B	Analisis Data	47
1	Pengujian Asumsi Klasik	47
2	Analisis Regresi Berganda	55
3	Pengujian Hipotesis	56
4	Pembahasan	61
BAB V	66
PENUTUP	66
A	Kesimpulan.....	66
B	Keterbatasan Penelitian	67
C	Saran.....	67
LAMPIRAN	72
Lampiran 1	73
Lampiran 2	87
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	73
Lampiran 2	88

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang sangat kuat serta mampu berkembang atau tidak tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat asset daerah terjaga keutuhannya.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah oleh NKRI yang bersifat otonomi dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pemberian wewenang dan tanggungjawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Mardiasmo,(2009:59) pada dasarnya terkandung 3 misi utama yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
3. Memberdayakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Salah satu jenis Belanja Daerah diantaranya adalah Belanja Modal yaitu , salah satu langkah pemerintah daerah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat demi kelancaran aktifitas pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daerah. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modal. Dalam pelaksanaannya kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari APBN atau Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Jenis Pajak daerah terdiri Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Objek retribusi daerah terdiri atas Retribusi JasaUmum, Retribusi JasaUsaha, dan Perizinan tertentu, tetapi untuk daerah tertinggal Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak daerah dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah.

Adanya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi**

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
2. Bagaimanakah pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
3. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi umum secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
4. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi khusus secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
5. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) secara simultan terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.

C Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini peneliti hanya fokus untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.

D Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
2. Untuk membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
3. Untuk membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
4. Untuk membuktikan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.
5. Untuk membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap belanja modal di D.I Yogyakarta tahun 2012-2016.

E Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan harapan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, untuk melengkapi penelitian terdahulu terutama dalam hal pengaruh pajak

daerah , retribusi daerah , dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan, acuan, gambaran, dan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap belanja modal untuk masa yang akan datang.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar dengan nilai positif dan membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di dalam masyarakat dan sebagai penerapan teori yang telah diambil selama bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Deskripsi Teori

1 Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama hal kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung

oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Nataluddin : 2001).

2 Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (1), Belanja modal adalah anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan, dan aset tetap lainnya.

Menurut PMK Nomor 127 Tahun 2015, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/ PMK.02/2015 pasal 53 Belanja Modal di gunakan untuk antara lain :

a) Belanja Modal Tanah, adalah pengeluaran/ biayayang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b)Belanja Modal Peralatan dan Mesin, adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pergantian/ dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yangmemberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c)Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biayayang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pergantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan, pembangunan gedung, dan bangunan yang menambah kapasitas gedung sampai gedung sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d)Belanja Modal Jalan, Irigasi,dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan,penambahan,pergantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencana, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi pakai.

e) Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

f) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) adalah pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor daerah.

Pengadaan dan pemeliharaan aset dikatakan sebagai Belanja Modal apabila pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan

bertambahnya asset dan/ bertambahnya massa manfaat/ umur ekonomis asset berkenaan. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset, memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara, dan pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/ dipasarkan kepada masyarakat/Pemda/etnis lain di luar Pemerintah Pusat (No.127/PMK.02/2015).

3 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai Undang-undang jenis pajak terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan, Pajak Rokok.
- b) Jenis Pajak Kabupaten/ kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Jenis Pemungutan Retribusi Daerah yaitu:

a) Jasa Umum

Retribusi jasa umum yang dikenakan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagai objek atas retribusi jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan bermafaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yaitu:

Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam

kebakaran retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi teraulang, retribusi pelayanan pendidikan dan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi jasa umum dimaksud dapat juga tidak dipungut bila ternyata potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

b) Jenis Usaha

Kategori jasa usaha dalam hal ini adalah retribusi pemakaman kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelanggan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c) Perizinan Tertentu

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu ini meliputi:

Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin tempat pejualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, Retribusi izin trayek, dan Retribusi izin perikanan.

5 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2007), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan dimaksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam

rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Wandira, 2013).

Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif, dan untuk meningkatkan Pajak Daerah. Sehingga dapat disimpulkan DAU memiliki tujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

6 Dana Alokasi Khusus

Dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang No 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, dll.

B Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai belanja modal, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dari tahun 2004-2005. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Tuasikal, Askam (2008) meneliti tentang Pengaruh DAU, DAK PAD dan PDRB terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Kab/Kota di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan hasil penelitian bahwa secara simultan DAU, DAK, PAD, dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah di Kab/Kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Secara parsial, hasil menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal di Kab/Kota di Indonesia. Sementara PDRB tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pola manajemen pengeluaran pemerintah daerah Kab/Kota di Indonesia, khususnya yang terkait dengan belanja modal tidak terlalu mempertimbangkan PDRB salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal, rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.

Sianturi, Agave (2010) meneliti Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah LRA tahun 2005 sampai 2008 dengan sampel Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh adalah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Sulistiyowati, Diah (2011) meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal di Kab/ Kota di

Jawa dan Bali tahun 2007-2010. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Mamonto, Kalangi, dan Krest (2014) meneliti Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kab. Bolang Mangondow tahun 2004-2013. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Lestari, Dian (2015) meneliti Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kep. Riau tahun 2011-2014. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa secara parsial Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, sedangkan untuk Pajak daerah, DAU, DAK dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Wahyudi dan Handayani (2015) meneliti pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian belanja modal. Populasi dan Sampel penelitian yang digunakan adalah 6 pemerintah daerah di kabupaten / Kota di Jawa Timur. Metode yang

digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, secara parsial hanya retribusi daerah yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal sedangkan untuk variabel pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan.

Yunistin, Jullie, dan Winston (2016) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di kota Manado untuk periode 2008-2014. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Sampel	Metode Statistik	Hasil Penelitian
1	Darwanto dan Yustikasari (2007)	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen : 1)Pertumbuhan Ekonomi 2) PAD 3)DAU	Kab/Kota Jawa-Bali tahun 2004-2005	Analisis Regresi Linier Berganda	Hanya Variabel PAD dan DAU yang berpengaruh positif terhadap belanja modal

2	Askam Tuasikal (2008)	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen : a) DAU b) DAK c) PAD d) PDRB	Kab/Kota di Indonesia	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan DAU, DAK, PAD, PDRB berpengaruh terhadap belanja modal, secara parsial hanya PDRB yang tidak berpengaruh sedangkan DAU, DAK dan PAD berpengaruh
3	Agave Sianturi (2010)	Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen : a) Pajak Daerah b) Retribusi Daerah	Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2008	Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
4	Diah Sulistyowati (2011)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independent: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. DAU d. DAK	Kab/Kota Jawa dan Bali	Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU secara signifikan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal
5	Mamonto, Kalangi dan Krest (2014)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah	Kab. Bolaang Mongondow	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara Parsial variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, secara simultan juga

					tidak memiliki pengaruh
6	Dian Lestari (2015)	Variabel Dependen: a)Belanja Modal Variabel Independen: a) Pajak Daerah b)Retribusi Daerah c) DAU d) DAK e) DBH	Kep.Riau	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara Parsial Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, pajak daerah, DAU,DAK dan DBH memiliki pengaruh signifikan. secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK dan DBH bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
7	Wahyudi dan Handayani (2015)	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen : a)Pajak Daerah b)Retribusi Daerah c)Dana Alokasi Umum d)Dana Alokasi Khusus	Kab/Kota di Jawa Timur	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah , DAU, DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal secara parsial hanya retribusi daerah yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal

8	Yunistin, Jullie, dan Winston (2016)	Variabel dependen: Belanja Modal Variabel independen : a) PAD b) DAK	Kota Manado	Ananlisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
---	--------------------------------------	---	-------------	-----------------------------------	---

C Kerangka Berpikir

Belanja daerah yang seringkali diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja operasi. Padahal untuk pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja modal pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.

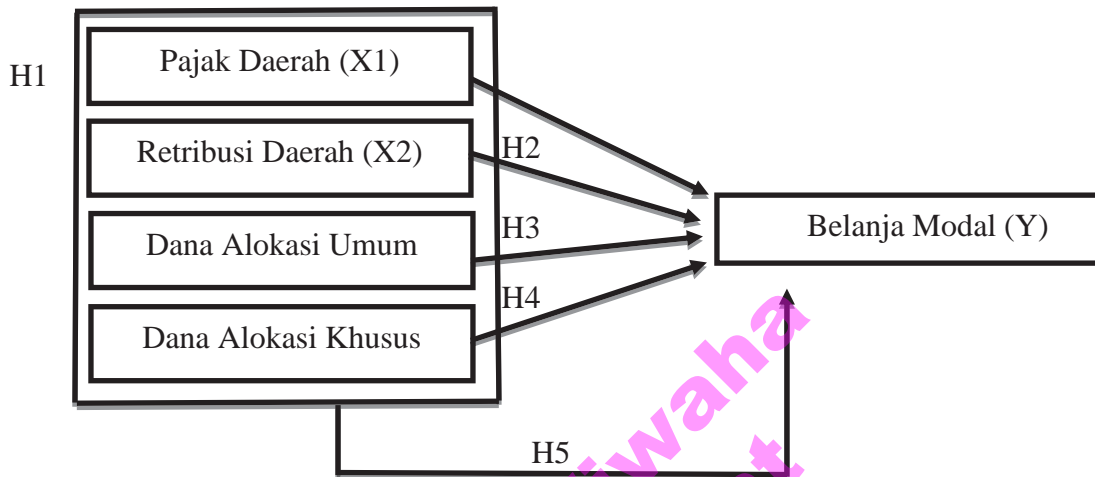
Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah pengaruh pajak dan retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah yang seringkali lebih diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja operasi. Padahal untuk pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja

modal pemerintah daerah menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah seringkali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Perumusan Hipotesis



D Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara dari rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian.

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang disahkan. Dari beberapa komponen PAD tersebut, Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun Belanja Modal.

Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh

Pemerintah Daerah, maka semakin besarpula PAD sejalan dengan Lestari (2015), Pajak Daerah memiliki memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, dan juga menurut penelitian Sulistyowati(2011), menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dinyatakan sebagai berikut :

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Wahyudi dan Handayani (2015), retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Menurut Sulistyowati (2011), kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut penelitian Sulistyowati (2011), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan penelitian Lestari (2015), juga menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK merupakan dana yang bersumber dari

APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dari prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Menurut penelitian Wahyudi dan Handayani (2015), menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dalam penelitian Lestari (2015), DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian Yunistin, Julie, dan Winston (2016), DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sejalan dengan penelitian Tuasikal (2008) juga menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBD. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011), tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, dan menurut penelitian Lestari (2015), secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Landasan teori di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) D.I Yogyakarta yang berhubungan dengan objek penelitian dan dapat memberikan informasi tentang penelitian yang sedang diteliti.
2. Objek Penelitian adalah D.I Yogyakarta yang terdiri dari lima Kabupaten/Kota dengan memfokuskan penelitian pada APBD pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal tahun Anggaran 2012-2016.

B Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

C Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data kuantitatif yang termuat dalam Laporan Statistik Keuangan Daerah yang terdiri atas lima Kabupaten/Kota yaitu: Kota Yogyakarta, Kab.Kulon Progo, Kab.Bantul, Kab.Gunung Kidul, dan Kab.Sleman tahun 2012-2016.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengcopy serta mencatat data-data Penerimaan Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah D.I Yogyakarta tahun 2012-2016

D Definisi Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas (*Independent*) dan terikat (*Dependent*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, sedangkan untuk variabel bebasnya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Definisi variabel dan pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Definisi Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
<i>Independent</i>			
1) Pajak Daerah	Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No 28 Th 2009)	Dasar Pengenaan Pajak \times Tarif Pajak	Nominal
2) Retribusi Daerah	Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus diberikan oleh	Tingkat Penggunaan Jasa \times Tarif Retribusi	Nominal

	pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. (UU No 28 Th 2009)		
3) Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum atau disebut DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (UU No 33 Th 2004 dan PP No.55 Th 2005)	26 % × Pendapatan dalam Negri (PDN Netto)	Nominal
4) Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU No 33 Th 2004 dan PP No. 55 Th 2005)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan memenuhi kriteria umum kriteria khusus, dan kriteria teknis 2. Penentuan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis (PP 55 Pasal 54) 	Nominal
<i>Dependent</i>			
5) Belanja Modal	Belanja modal adalah anggaran pengeluaranyang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,	Ditetapkan dalam APBD dalam setiap daerah yang jumlah anggarannya disusun berdasarkan pendapatan dari daerah tersebut untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan	Nominal

	jalan, irigasi dan bangunan, dan asset tetap lainnya. (PERMENDAGRI No 13 Th 2006)	ditetapkan berdasarkan peraturan daerah	
--	---	---	--

E Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik. Teknik ini digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian yang telah dibuat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 20. Dalam analisis regresi selain mengukur bagaimana hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat juga mengukur seberapa erat hubungan keduanya dan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskannya.

Berikut langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linear berganda:

1 Pengujian Asumsi Klasik

Asumsi Klasik merupakan salah satu pengujian prasyarat pada regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah apakah dalam model regresi linier variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan metode *Tabel Probability Plot*, Grafik Histogram dan *kolmogorov smirnov*. Pada uji *Kolmogorov Smirnov* dengan nilai t signifikan pada 0,05 jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov*

menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016).

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antaravariabel independent (Ghozali, 2016 hal 103). Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. $VIF = 1/Tolerance$, jika $VIF = 10$ maka $Tolerance = 1/10 = 0,1$.

c) Uji Autokorelasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series, sehingga menggunakan pengujian autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi hal tersebut maka digunakan uji statistik Durbin-Watson dan *Run Test*. Tabel keputusan uji statistik Durbin-Watson adalah sebagai berikut :

Tabel 2 :

Tabel Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicison</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No desicison</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau Negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali, Imam. 2016

Ketika menggunakan uji Durbin-Watson jika nilainya terletak antara dL dan dU atau diantara ($4-dU$) dan ($4-dL$), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan metode *Run Test*. *Run Test* sebagai bagian dari statistik non-parametik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi, tidak terjadi gejala autokorelasi ketika nilai probabilitas lebih dari taraf signifikan 0,05 (Ghozali, 2016).

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut Heterokedastisitas (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

2 Metode Regresi Linier Berganda

Regresi dalam pengertian moderen ialah sebagai kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu variabel tergantung terhadap satu variabel atau lebih variabel lainnya. Meski analisis regresi berkaitan dengan ketergantungan satu variabel terhadap variabel lainnya hal tersebut tidak harus menyiratkan sebab – akibat karena suatu hubungan statistik betapapun kuat dan sugestifnya tidak akan pernah dapat menetapkan sebab – akibat sedangkan gagasan mengenai sebab- akibat harus datang dari luar statistik, yaitu dapat berasal dari teori atau tulisan lainnya (Gujarati, 2009).

Penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus) dan 1 variabel dependen (belanja modal). Pengujian hipotesis dilakukan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono, (2014:277) persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

b = Slope atau Koefisien Regresi

- X1 = Pajak Daerah
X2 = Retribusi Daerah
X3 = Dana Alokasi Umum
X4 = Dana Alokasi Khusus
e = *error*

3 Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai uji statistik Uji t, Uji F dan Koefisien determinasi.

Berikut uji statistik untuk uji hipotesis :

a) Uji Signifikansi Parameter Individual (uji statistik t)

Uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah dengan *Quick Look* yaitu apabila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka H_0 yang menyatakan $b_i=0$ dapat ditolak bila t lebih besar dari 2 (dalam nilai *absolute*). Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006).

b) Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan nilai F-tabel. Jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan) dan jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel. Ini berarti secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterkaitan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-Square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel (Ghozali, 2006). Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtun

waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian

1 Data Umum

a) Keadaan Geografis D.I Yogyakarta

D.I Yogyakarta adalah daerah setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. D.I Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. D.I Yogyakarta terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada $8^{\circ}30' - 7^{\circ}20'$ Lintang Selatan, dan $109^{\circ}40' - 111^{\circ}0'$ Bujur Timur. Berdasarkan bentang alam, wilayah D.I Yogyakarta dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi yaitu, satuan fisiografi Gunung Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah.

b) Wilayah Administrasi

Secara Administrasi D.I Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km² terdiri atas satu Kotamadya dan empat Kabupaten yaitu, Kota Yogyakarta, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul, dan Kab. Sleman yang keseluruhannya terbagi dalam 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Berikut Peta D.I Yogyakarta dan tabel pembagian wilayah secara administratif :

Gambar 4.1

Peta D.I Yogyakarta



www.google.com/mymaps

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Administrasi D. I Yogyakarta

No	Kota/ Kab	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Km ²)
1	Yogyakarta	14	-	32,50 km ²
2	Kulon Progo	12	88	586,27 km ²
3	Bantul	17	75	506,86 km ²
4	Gunung Kidul	18	144	1.485,36 km ²
5	Sleman	17	86	574,82 km ²

Sumber : BPS (2016)

c) **Kondisi Demografis**

Penduduk D.I Yogyakarta pada tahun 2016 menurut BPS D.I Yogyakarta sebanyak 3.606.111 jiwa dengan penduduk laki-laki

1.794.983 jiwa dan penduduk perempuan 1.811.128 jiwa yang tersebar di 5 Kabupaten/ Kota.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta 2016

No	Kota/Kab	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	Yogyakarta	200.089	210.173	410.262
2	Kulon Progo	221.293	224.362	445.655
3	Bantul	465.769	465.587	931.356
4	Gunung Kidul	376.091	379.886	755.977
5	Sleman	531.741	531.120	1.062.861
	Jumlah	1.794.983	1.811.128	3.606.111

Sumber : BPS (2016)

d) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta pada tahun 2012 – 2016 mengalami naik turun. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 di ukur dari kenaikan PDRB atas dasar konstan 2.000 meningkat sebesar 5,32 % terhadap 2011, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 meningkat sebesar 5,40 % dari tahun 2012, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tumbuh 5,20 % sedikit melambat dari tahun 2013, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tumbuh 4,9 % melambat dari tahun 2014, dan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tumbuh 5,05 % meningkat dari tahun 2015.

D.I Yogyakarta juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi objek wisata yang terjangkau, dan mudah ditempuh. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian D.I Yogyakarta yang secara umum bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: jasa-jasa, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pertanian. Dalam hal ini

pariwisata memberi efek pengganda yang nyata bagi sektor perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan.

2 Data Khusus

a) Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di D.I Yogyakarta adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal tahun 2012 sampai 2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta. Data yang diperoleh diolah menggunakan uji asumsi klasik, linier berganda dan uji hipotesis dengan aplikasi SPSS 20.0. Berikut data – data penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK , dan Belanja Modal di Wilayah D.I Yogyakarta tahun 2012-2016

1) Pajak Daerah

Adapun data penerimaan pajak daerah dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012 sampai 2016 di D.I Yogyakarta yang terdiri dari lima Kab/Kota yaitu:

Tabel 4.3 :

Pajak Daerah Wilayah D.I Yogyakarta 2012-2016

(000 Rp)

Kab/Kota	Tahun / Pajak Daerah				
	2012	2013	2014	2015	2016
Yogyakarta	689.572.065	1.063.314.118	1.098.908.544	1.296.531.744	1.377.156.183
Kulon Progo	6.333.326	8.696.477	17.122.528	35.342.785	37.289.400

Bantul	32.090.347	83.232.018	70.946.200	85.000.100	104.668.270
Gunung Kidul	8.328.000	12.350.677	24.043.480	28.083.980	36.178.236
Sleman	132.330.000	274.628.956	234.300.000	346.000.000	373.137.768

Sumber : BPS DI. Yogyakarta

2) Retribusi Daerah

Adapun data penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016 di D.I Yogyakarta yang terdiri dari lima Kab/Kota yaitu:

Tabel 4.4 :
Retribusi Daerah Wilayah D.I Yogyakarta 2012-2016
(000 Rp)

Kab/Kota	Tahun / Retribusi Daerah				
	2012	2013	2014	2015	2016
Yogyakarta	36.228.288	38.043.015	36.670.322	40.376.418	36.998.728
Kulon Progo	9.902.587	14.986.510	16.506.006	20.096.134	10.248.939
Bantul	21.512.622	27.116.286	20.725.749	26.774.227	21.918.542
Gunung Kidul	17.231.674	25.024.940	21.645.534	24.197.966	28.059.628
Sleman	32.199.504	48.001.680	32.537.957	41.145.280	45.086.332

Sumber : BPS DI. Yogyakarta

3) Dana Alokasi Umum

Adapun data penerimaan Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016 di D.I Yogyakarta yang terdiri dari lima Kab/Kota yaitu:

Tabel 4.5 :
Dana Alokasi Umum Wilayah D.I Yogyakarta 2012-2016
(000 Rp)

Kab/Kota	Tahun / Dana Alokasi Umum				
	2012	2013	2014	2015	2016
Yogyakarta	757.056.696	828.334.768	899.923.550	920.544.722	940.835.434
Kulon Progo	531.104.016	594.978.790	639.409.211	657.260.489	718.490.508
Bantul	768.034.584	854.810.634	949.252.188	942.850.827	999.814.365
Gunung Kidul	687.944.489	779.069.238	847.388.294	872.566.961	872.566.961
Sleman	795.708.767	891.589.912	952.102.502	984.410.612	984.410.612

Sumber : BPS DI. Yogyakarta

4) Dana Alokasi Khusus

Adapun data penerimaan Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam jangka waktu 5 tahun dari tahun 2012-2016 di D.I Yogyakarta yaitu :

Tabel 4.6 :
Dana Alokasi Khusus Wilayah D.I Yogyakarta 2012-2016
(000 Rp)

Kab/Kota	Tahun / Dana Alokasi Umum				
	2012	2013	2014	2015	2016
Yogyakarta	19.052.740	828.334.768	899.923.550	39.084.040	719.033.950
Kulon Progo	45.379.520	52.894.140	47.077.300	53.805.650	317.910.881
Bantul	63.281.450	47.196.880	60.914.370	61.102.870	119.437.060
Gunung Kidul	70.584.420	59.793.058	61.562.860	72.771.380	84.971.370
Sleman	52.237.390	50.823.330	48.673.210	33.168.100	29.421.080

Sumber : BPS DI. Yogyakarta

5) Belanja Modal

Adapun data realisasi Belanja Modal dalam jangka waktu tahun dari tahun 2012-2016 di D.I Yogyakarta yaitu:

Tabel 4.7 :

Belanja Modal Wilayah D.I Yogyakarta 2012-2016

(000 Rp)

Kab/Kota	Tahun / Belanja Modal				
	2012	2013	2014	2015	2016
Yogyakarta	217.958.664	369.395.794	399.119.628	698.840.749	947.405.795
Kulon Progo	138.686.254	123.313.526	152.465.373	221.474.528	307.589.295
Bantul	127.093.638	183.269.840	289.887.759	293.496.092	338.953.648
Gunung Kidul	190.308.088	156.373.179	160.375.383	197.764.906	238.175.034
Sleman	130.674.475	206.859.865	311.278.754	540.160.272	426.782.827

Sumber : BPS DI. Yogyakarta

B Analisis Data

1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi adalah dilakukan uji Asumsi Klasik, Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak karena syarat untuk Analisis Regresi adalah semua data dalam uji Asumsi Klasik harus berdistribusi normal. Beberapa pengujian dalam uji Asumsi Klasik adalah sebagai berikut :

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis Grafik Histogram, normal Probability-Plot dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut uji normalitas dengan Grafik Histogram, P- Plot, dan uji statistik *Kolmogorov Smirnov* :

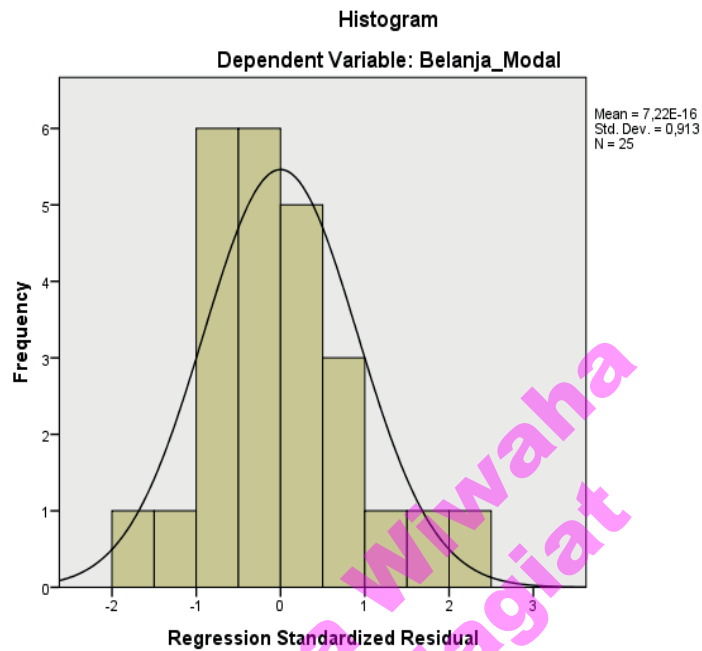
1. Uji Grafik Histogram

Data dikatakan berdistribusi normal jika data menyebar mengikuti arah garis histogramnya, sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal jika tidak mengikuti arah garis histogramnya.

Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram:

Gambar 4.2

Hasil Output SPSS : Uji Normalitas Grafik Histogram



Sumber : data diolah SPSS.20

Berdasarkan histogram di atas terlihat bahwa kenaikan / penurunan data observasi mendekati garis melengkung dan tidak melenceng kekiri atau kekanan yang menggambarkan distribusi normal.

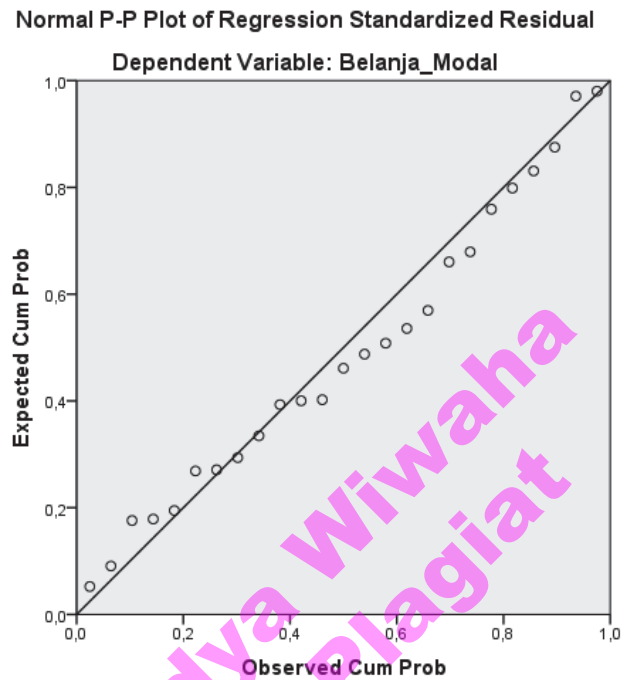
2. Uji *Normal Probability Plot* (P-Plot)

Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sebaliknya, data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti digonal atau tidak mengikuti diagonal.

Berikut hasil uji normalitas menggunakan *Probability Plots*:

Gambar 4.3

Hasil Output SPSS :Uji Normalitas P-Plot



Sumber : data diolah SPSS.20

Hasil uji normalitas menggunakan *normal probability plot* terlihat bahwa titik–titik menyebar di sekitar garis diagonal serta menyebar mengikuti garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.

3. Uji Statistik (*Kolmogorov Smirnov*)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov* yaitu apabila taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, jika lebih kecil dari signifikansi 0,05 maka data berdistribusi tidak normal dan apabila

D-hitung kurang dari D-tabel maka H0 diterima data berdistribusi normal.

Berikut hasil normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorv Smirnov* :

Tabel 4.8

Hasil Output SPSS :Uji Normalitas Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		25
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1E-7
	Std. Deviation	93209840,59
	Absolute Most Extreme Differences	,104
Kolmogorov-Smirnov Z	Positive	,104
	Negative	-,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,519
		,950

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah SPSS.20

Hasil output uji di atas menunjukkan bahwa nilai Absolute 0,104 dengan signifikasi 0,950 lebih besar dari 0,05. *Tabel Kolmogorov Smirnov* untuk sampel 25 diperoleh nilai D-tabel sebesar 0,264, hasil dari D-hitung adalah < dari D-tabel 0,264 makadapat dikatakan data berdistribusi normal,dapat dilihat bahwa variabel Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan, DAK berdistribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutt off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* <10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Berikut tabel statistik hasil uji dengan SPSS untuk uji Multikoleniaritas :

Tabel 4.9
Hasil Output SPSS :Uji Multikoleniaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error		Tolerance	VIF
(Constant)	343825831,722	148583921,714			
Pajak_Daerah	,375	,061	,856	,567	1,764
1 Retribusi_Daerah	-6,793	3,624	-,403	,241	4,150
Dana_Alokasi_Umum	,843	,249	,556	,412	2,428
Dana_Alokasi_Khusus	,312	,435	,089	,713	1,402

a. Dependent Variable: Belanja_Modal
Sumber : data diolah SPSS.20

Berdasarkan output diatas diketahui bahwa semua Nilai *Tolerance* semua variabel Independent lebih besar dari 0,10 dan Nilai VIF semua

variabel independet lebih kecil dari 10,00 maka dapat dilihat tidak terjadi Multikoleniaritas.

c) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang terjadi antara residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya pada satu pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi.

Berikut tabel statistik hasil uji dengan SPSS untuk uji autokorelasi dengan Run Test:

Tabel 4.10

Hasil Output SPSS: Uji Autokorelasi (Run Test)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-9957337,89926
Cases < Test Value	12
Cases >= Test Value	13
Total Cases	25
Number of Runs	14
Z	,008
Asymp. Sig. (2-tailed)	,993

Sumber : data diolah SPSS.20

Hasil *Run Test* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yang berarti Hipotesis nol ditolak hasil uji statistik dengan *Run Test* tidak terdapat masalah autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan variabel residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Glejser dan melihat pola grafik regresi pada Scatterplots. Berikut uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dan Scatterplots:

1. Uji Glejser

Uji Glejser merupakan uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual kemudian dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya. Berikut hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser :

Tabel 4.11

Hasil Output SPSS : Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24011722,612	72121747,945		,333	,743
Pajak_Daerah	,080	,030	,625	2,693	,14
Retribusi_Daerah	-1,461	1,759	-,296	-,830	,416
Dana_Alokasi_Umum	,098	,121	,221	,810	,428
Dana_Alokasi_Khusus	-,266	,211	-,261	-	,222
				1,260	

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : data diolah SPSS.20

Dari output diatas terlihat bahwa hasil uji statistik dari masing-masing menunjukkan nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka terlihat bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas.

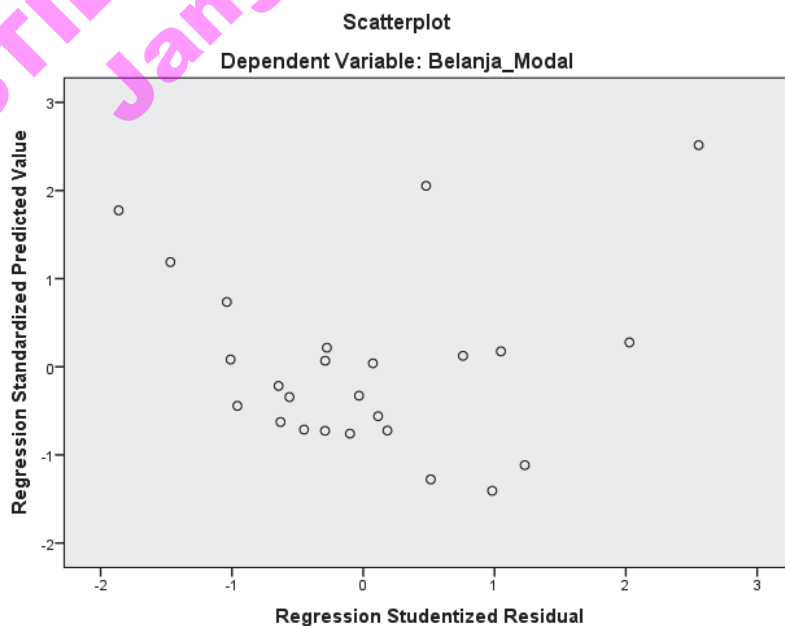
2. Uji Grafik Scatterplots

Uji ini yaitu dengan cara melihat pola titik-titik pada grafik Scatterplots jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan Grafik Scatterplot:

Gambar 4.4

Hasil Output SPSS :Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)



Sumber : data diolah SPSS.20

Berdasarkan output Scatterplot di atas terlihat bahwa titik titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada regresi sehingga model regresi layak digunakan.

2 Analisis Regresi Berganda

Dalam pengelolaan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Output SPSS : Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	343825831,722	148583921,714		- 2,314	,031
Pajak_Daerah	,375	,061	,856	6,111	,000
1 Retribusi_Daerah	-6,793	3,624	-,403	- 1,874	,076
Dana_Alokasi_Umum	,843	,249	,556	3,386	,003
Dana_Alokasi_Khusus	,312	,435	,089	,717	,482

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber : data diolah SPSS.20

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 343825831,722 + 0,375X_1 + 0,843X_3 + 0,312X_4 + e$$

Adapun dilihat dari tabel *coefficients* dan persamaan dari regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien Pajak Daerah (b_1) sebesar 0,375 yang berarti bahwa setiap ada kenaikan Pajak Daerah 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,375 atau 37,5%.
- 2) Nilai Koefisien Dana Alokasi Umum (b_3) sebesar 0,843 yang berarti bahwa setiap ada kenaikan Dana Alokasi Umum 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,843 atau 84,3%.
- 3) Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (b_4) sebesar 0,312 yang berarti bahwa setiap ada kenaikan 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,312 atau 31,2%.

3 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi. Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya (Fisher, 1925 P.43). Uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol, ini adalah pengujian untuk

menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar (Cramer and Howitt 2004 hlm 76). Berikut uji statistik dengan SPSS untuk pengujian hipotesis :

a) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial (Individual) terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Dasar dari pengambilan keputusan untuk Uji t (Parsial) dalam analisis regresi adalah jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dengan $df = n - k$ ($df = 25-4$), nilai t tabel menunjukkan 2,079 maka hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut berdasarkan tabel 4.12 :

1. Hasil uji t untuk H1 diperoleh hasil t – hitung sebesar 6,111 dengan signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $6,111 >$ t-tabel sebesar 2,079 artinya bahwa

H1 diterima sehingga Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

2. Hasil uji t untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar -1,847 dengan signifikansi sebesar 0,076. Nilai signifikansi untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai di atas tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-1,847 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,079 artinya bahwa H2 ditolak sehingga Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

3. Hasil uji t untuk H3 diperoleh hasil t – hitung sebesar 3,386 dengan signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $3,386 > t\text{-tabel}$ sebesar 2,079 artinya bahwa H3 diterima sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Hasil uji t untuk H4 diperoleh hasil t – hitung sebesar 0,717 dengan signifikansi sebesar 0,482. Nilai signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai di atas tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $0,717 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,079 artinya bahwa H4 ditolak sehingga Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

b) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel- variabel independen secara bersama- sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Hasil Output SPSS : Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7297064335881 21470,000	4	1824266083970 30368,000	17,498	,000 ^b
	Residual	2085137852317 63488,000	20	1042568926158 8174,000		
	Total	9382202188198 84930,000	24			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. Predictors: (Constant), Dana_Alokasi_Khusus, Dana_Alokasi_Umum, Pajak_Daerah, Retribusi_Daerah

Sumber : data diolah SPSS.20

Hasil uji F pada tabel di atas untuk menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus mempunyai F-hitung sebesar 17,498 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar $17,498 > F\text{-tabel } 2,87$ yang artinya H_0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

c) Analisis Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan keeratan variabel Independen terhadap variabel Dependen, nilai (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14

Hasil Output SPSS :Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,882 ^a	,778	,733	102106264,556	1,235

Sumber : data diolah SPSS.20

Berdasarkan tabel Model Summary di atas, nilai R adalah 0,882 menunjukkan bahwa korelasi atau kekuatan atau keeratan hubungan linier antar variabel merupakan korelasi yang kuat antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dan nilai koefisien determinasinya (*R Square*) sebesar 0,778. Hal ini berarti 77,8% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK sedangkan sisanya ($100 - 77,8\% = 22,2\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

4 Pembahasan

a) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 4.34, signifikan sebesar 0,00 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,375, sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal diterima, ini berarti jika Pajak Daerah meningkat 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.375.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk Belanja Modal, ini berarti di D.I Yogyakarta dari tahun 2012-2016 mengalokasikan pajaknya untuk Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sianturi(2010), yang menyatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal, Penelitian Lestari (2015) yang menyimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Penelitian oleh Sulistyowati (2011), menyatakan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamonto, Kalangi, dan Krest (2014), menyatakan bahwa secara parsial dan secara tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

b) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 4.34, signifikan sebesar 0,076 dimana lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif -6,793, sehingga hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal ditolak dan naik turunnya Retribusi Daerah tidak mempengaruhi Belanja Modal.

Undang – Undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah salah satunya yaitu Belanja Modal tarif dari Retribusi Daerah ditentukan oleh masing- masing daerah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianturi(2010), menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Penelitian Lestari(2015), menyatakan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Penelitian Mamonto, Kalangi, dan Krest (2014), juga menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), bahwa secara parsial Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, dan juga penelitian oleh Diah (2011), bahwa Retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

c) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan bernilai positif, dilihat dari uji t pada tabel 4.34, nilai signifikansi sebesar 0,03 dimana lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif 8,43 sehingga hipotesis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal diterima, setiap kenaikan 1% Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Modal sebesar 8,43. Penerimaan dari Dana Alokasi Umum memang sangat besar dibanding pendapatan yang lain, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2015 bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), yang menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Penelitian oleh Tuasikal (2008), menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

d) Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dilihat dari uji t pada tabel 4.34 nilai signifikansi sebesar 0,482 dimana lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,312.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, namun berbeda dengan Penelitian oleh Lestari (2015), menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015), menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, juga penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008), yang menyatakan bahwa secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

e) Pengaruh secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pengujian simultan atau uji F, variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hasil output SPSS dari uji F pada tabel 4.35 signifikan sebesar 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi (*R square*) pada tabel 4.36 sebesar

0,778. Hal ini berarti 77,8 % variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus semuanya merupakan pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah salah satunya adalah Belanja Modal yang sangat berguna untuk pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Handayani (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Penelitian oleh Lestari (2015), menyatakan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAUK, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi pada uji t 0,00 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga, secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan apabila terjadi kenaikan Pajak Daerah maka akan meningkatkan Belanja Modal.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi pada uji t 0,076 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga, secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan apabila terjadi kenaikan Retribusi Daerah tidak akan meningkatkan Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi pada uji t 0,03 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga, secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan Belanja Modal.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi pada uji t 0,482 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga, secara parsial Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Modal dan apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Khusus tidak akan meningkatkan Belanja Modal.

5. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai F-hitung 17,498 lebih besar dari nilai F-tabel 2,87.

Untuk pengujian koefisien determinasi nilai R^2 0,778, hal ini berarti 77,8% variabel Belanja Modal dijelaskan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan sisanya 22,2% dijelaskan oleh faktor lain.

B Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sampel data yang digunakan sebagai variabel penelitian hanya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.
2. Data penelitian hanya Wilayah D.I Yogyakarta yang terdiri dari lima Kab/Kota dalam kurun waktu lima tahun 2012-2016.

C Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas dalam rentang waktu yang lebih panjang dengan variabel dependen yang lain

dan variabel independen yang lebih bervariasi dengan menambahkan variabelnya atau dengan menambahkan variabel moderating.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Cramer, Duncan, Dennis Howitt (2004). "The Sage Dictionary of Statistics". ISBN 076194138X.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Anggaran Belanja Modal ".*Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.*
- Ghozali, Imam.(2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Cetakan keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam.(2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Cetakan kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, N., Damodar dan Dawn C.P.(2009). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2007).*Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lestari, Dian. (2015). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kep.Riau".*Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Tanjung Pinang. Kep. Riau.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mamonto, Yossi Sandry, Kalangi, J.B, dan Tolosang Krest . D. (2014). "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow 2004-2013". *Skripsi Sarjana. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Ndede, Yunistin, Sondakh J. Jullie, dan Pontoh, Wisnton. (2016). " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado ". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16, No 03*.
- Nataluddin. (2001). *Potensi Dana Perimbangan pada Penerimaan Daerah diPropinsi Jambi*. Manajemen Keuangan Daerah.UPP AMP YKPN.

- R.A. Fisher (1925). *Statistical Methods for Research Workers*. Edinburgh : Oliver and Boyd.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia.(2009). *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia.(2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Jakarta
- Sulistiyowati, Diah (2011). “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, Agave. (2010). “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara”. *Skripsi Sarjana. Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara*.
- Tuasikal, Askam. (2008). “Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Indonesia”. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 1, No 2 Hal 142- 155*.
- Wahyudi, Valencia, Maria dan Handayani, Nur. (2015).”Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, DAK terhadap pengalokasian belanja modal”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No 11*.

Wandira, Arbie Gugus.(2013). “Pengaruh PAD,DAU,DAK, dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal“. *Skripsi Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang.*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat